



Kelembagaan Kereta Ringan Perlu Diperjelas

Pemprov DKI Tunjuk Badan Usaha Milik Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Struktur lembaga yang bertanggung jawab membangun jaringan kereta ringan kembali tidak jelas menyusul keputusan Gubernur DKI Jakarta menunjuk badan usaha milik daerah untuk membangun LRT tersebut. Padahal, sebelumnya telah terbentuk badan layanan umum daerah untuk keperluan itu.

Awal Juni lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pembentukan badan layanan umum daerah (BLUD) untuk menangani pembangunan kereta ringan. (*light rail transit/LRT*). Bernhard Hutajulu, mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, ditunjuk menjadi Kepala BLUD LRT.

Meski demikian, belakangan rencana tersebut berubah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/6), mengatakan, pihaknya menunjuk badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya sebagai operator pembangunan LRT.

Basuki mengaku kecewa dengan perkembangan kerja BLUD. Dalam beberapa pekan terakhir, lelang proyek yang diharapkan terealisasi tidak kunjung terjadi.

Dia berharap penunjukan BUMD kali ini dapat merealisasikan dimulainya proyek pembangunan Koridor I LRT Kelapa Gading-Kebayoran Lama paling lambat akhir tahun ini.

Penunjukan BUMD tersebut, menurut Basuki, sudah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur. BUMD menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk membangun jalur LRT.

Infrastruktur yang terbangun diharapkan nantinya menggaet minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan lanjutan.

"Dalam situasi pembangunan infrastruktur transportasi yang seret, pemerintah harus memulainya untuk memancing investor swasta, seperti dilakukan Tiengkong. Dengan cara ini, kami ingin pembangunan infrastruktur lebih cepat," ujar Basuki.

Pada tahap awal, Pemprov DKI Jakarta akan menganggarkan Rp 500 miliar di APBD perubahan tahun 2015 untuk pekerjaan fisik LRT. Selain Koridor I sepanjang 21,6 kilometer (km), koridor yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, juga akan diprioritaskan untuk dibangun lebih dulu.

Koridor Bandara-Cempaka Putih itu dinilai penting untuk mendukung mobilitas peserta Asian Games 2018 dari bandara ke kampung atlet dan beberapa lokasi pertandingan.

Konsultasi Dewan

Meski demikian, langkah Basuki menunjuk BUMD ini mendapatkan kritikan dari DPRD

DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana berpendapat, Pemprov DKI tak bisa begitu saja menunjuk BUMD sebagai penanggung jawab pembangunan LRT.

Menurut dia, Perpres 38 Tahun 2015 tidak bisa dijadikan dasar hukum penunjukan. Terlebih, penunjukan itu berimplikasi pada penambahan modal triliun rupiah dari APBD kepada BUMD terkait.

"Pemprov DKI harus segera memperjelas kelembagaan, keuangan, dan bagaimana pelaksanaannya. Sejauh ini belum jelas sehingga kami (DPRD DKI Jakarta) tidak bisa memberikan masukan. Padahal, LRT ini menjadi prioritas pembangunan tahun ini," kata Triwisaksana.

Penyertaan modal ke BUMD, menurut dia, harus mendapatkan persetujuan DPRD karena menyangkut proyek tahun jamak. Terlebih, Pemprov DKI memiliki keterbatasan karena APBD tahun ini ditetapkan dengan peraturan gubernur yang membatasi pengalokasian anggaran hanya untuk tahun ini.

Dalam draf awal, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun tujuh koridor LRT sepanjang 108,7 km. Tujuh koridor yang direncanakan itu adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), terusan Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

(MKN)